



JUM'AT , 11 JANUARI 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

TGR Rp 1,3 M Belum Tuntas

**Tunggu
Instruksi Bupati**

KOTA MANNA, BE - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tuntutan ganti rugi (TGR) sejak tahun 2015 hingga 2017 belum juga lunas. Pasalnya masih ada sebesar Rp 1,3 Miliar yang belum dilunasi perusahaan. Hanya saja, untuk melimpahkan perkara tersebut ke aparat penegak hukum, pihak Inspektorat Bengkulu Selatan (BS) masih menunggu persetujuan Plt Bupati BS.

"Permasalahan tersebut sudah kami sampaikan ke Pak Plt Bupati, saat ini kami menunggu instruksi," kata Kepala Inspektorat BS, Hj Diah Winarsih SH.

Mbak Win, sapaan akrab kepala Inspektorat BS ini, tunggakan tersebut oleh 13

perusahaan. Adapun ke-13 perusahaan yang menunggak membayar TGR ini tersebar di 3 organisasi perangkat daerah (OPD) yakni di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Sekretariat daerah. Di dinas PUPR ada 6 perusahaan yakni CV Nuansa Group, CV Ampera Group, CV Generasi Tujuh Putra Adidayah, PT Jurai Putra Agung, PT Senata Jati Putra dan CV Citra Kirana Sakti. Dinas Kesehatan ada 6 Perusahaan juga yakni CV Putri Yen Konstruksi, CV Sinar Surya Abadi, CV Rizky Putra Selatan, CV Mensama Bersaudara, PT Berkas Serasan Mandiri, dan CV Rezky CB. Serta 1 perusahaan yang menunggak TGR di sekretariat daerah yakni CV Devina Palembang.

"Meskipun saat ini sudah memasuki 2019, namun ke-13 perusahaan ini belum melunasi tunggakannya," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Mbak Win, pihaknya masih menunggu instruksi Plt Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM, apakah nanti tunggakan tersebut akan dibawa ke ranah hukum, atau tidak. Sebab instruksi tersebut menjadi dasar bagi pihaknya untuk menindaklanjuti tunggakan tersebut.

"Apapun instruksi Pak Plt Bupati, kami siap menindaklanjutinya," imbuhnya.

Mbak Win menjelaskan, TGR ini masuk pada kategori korupsi dan merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah BS. Sebab sudah menjadi temuan BPK. Selain itu, dengan adanya TGR ini dapat menghambat BS meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Kalau masalah TGR tidak juga tuntas, tentu bisa menjadi penghambat BS meraih predikat WTP tahun ini," terang Mbak Win. (369)